



RISIKO POLITIK IDENTITAS TERHADAP PLURALISME DI INDONESIA

Junaidin Basri*¹, Syakira Ainun Nisa Basri, Irma Indriyani³

^{1,2}Dosen STAI Al-Musaddadiyah Garut, Jawa Barat, Indonesia

³Mahasiswa Hukum Tatanegara, UIN Bandung, Jawa-Barat, Indonesia

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, UIN Bandung, Indonesia

junaidin.basri@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

This study aims to reveal a description of the risks that occur when identity politics develops in Indonesia. For research purposes, the method used is qualitative with a descriptive approach. The results of the study conclude that: Identity politics is politics that basically embraces identity equality to raise the degree of a group due to a sense of unworthiness, this politics has experienced developments that were previously to raise the degree of certain groups into political tools ridden by political elites for personal gain and for gain votes during elections, while Pluralism is a condition of people who can live side by side in a diverse society so that people can live in harmony. Pluralism in a nation is quite important, especially in a multi-ethnic, religious, racial, and inter-group area so that they can live side by side with each other, while the risk that can arise from identity politics towards pluralism is the disappearance or fading of pluralism itself. poses other risks, such as the loss of tolerance between communities, can lead to physical or non-physical violence, the emergence of domestic disintegration movements, and the worst risk is the destruction of a country.

Keywords: Identity Politics and Pluralism Risk

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gambaran risiko yang terjadi ketika politik identitas berkembang di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Politik identitas adalah politik yang pada dasarnya menganut persamaan identitas untuk menaikkan derajat suatu kelompok karena adanya rasa tidak berharga, politik ini telah mengalami perkembangan yang sebelumnya mengangkat derajat kelompok tertentu menjadi alat politik yang ditunggangi. oleh elit politik untuk keuntungan pribadi dan untuk mendapatkan suara pada saat pemilu, sedangkan Pluralisme adalah kondisi masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam sehingga masyarakat dapat hidup rukun. Pluralisme dalam suatu bangsa cukup penting, terutama di wilayah yang multi etnis, agama, ras, dan antar golongan agar dapat hidup berdampingan satu sama lain, sedangkan risiko yang dapat ditimbulkan dari politik identitas menuju pluralisme adalah hilangnya atau memudarnya pluralisme itu sendiri. menimbulkan risiko lain, seperti hilangnya toleransi antar masyarakat, dapat menimbulkan kekerasan fisik maupun non fisik, munculnya gerakan disintegrasi rumah tangga, dan risiko terburuk adalah kehancuran suatu negara.

Kata Kunci: Politik Identitas dan Risiko Pluralisme

PENDAHULUAN

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. Keanekaragaman bukanlah sebuah ancaman, melainkan untuk saling melengkapi dari berbagai unsur-unsur yang ada. Islam sebagai salah satu agama yang *rahmatan lillaalamin* memiliki prinsip *universal* dan *uptodate*, memberikan gambaran bahwa perbedaan ada dalam kehidupan baik perbedaan individu maupun kelompok,¹ sebagaimana dalam QS. Al-hujurat: 13, (Utsmani, 2018) yang artinya:

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.* (QS. Al-hujurat:13).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia bermacam-macam itu untuk saling mengenal tanpa melihat perbedaan antar individu atau kelompok sehingga manusia dapat hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Tetapi ada saja yang belum bisa menerima perbedaan dikarenakan beberapa hal salah satunya ialah kepentingan pribadi atau kelompok yang diutamakan. Karena adanya perbedaan dan adanya kepentingan individu atau kelompok menimbulkan cara berpolitik yang baru yaitu politik identitas.

Politik identitas itu sendiri muncul terlebih di negara-negara yang multikultural (negara yang beragam) sehingga menyebabkan politik ini subur, hal tersebut muncul akibat pandangan dari masyarakat yang cenderung bersikap primordialis atau dalam kata lain mengunggulkan kelompoknya masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dari sentiment masyarakat terhadap suku, ras, dan agama. Politik identitas, kehadirannya tentu saja menuai banyak pro dan kontra di masyarakat, politisi, hingga pakar politik, karena dikhawatirkan dapat mengancam pluralisme dalam suatu negara. Bagaimana tidak politik ini menonjolkan atau mempertajam perbedaan yang ada yang memungkinkan terjadinya konflik.

Pluralisme dalam suatu bangsa itu penting khususnya bagi negara Indonesia, hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang multi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Keanekaragaman SARA tersebut menjadi satu fakta yang mengharuskan warga negaranya untuk menerima perbedaan tanpa harus memaksakan kehendak salah satu kelompok yang paling benar. Pluralitas ialah modal untuk mewujudkan sila ke-3 dalam Pancasila yaitu “persatuan Indonesia” agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan saling menjaga hak-hak antar individu untuk mengurangi konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan² (Munawar, 2018, hlm. xlii).

¹Ratma Ningsih, d. (2013, November). www.academis.edu. Retrieved from <https://www.acadeis.edu/6194297>

²Munawar, R. B. *Reorientasi Pembaruan Islam Sekulerisasi, Liberalisasi dan Pluralisme Pradigma Baru Islam Indonesia* (Malang: PUSAM UMM, 2018), h. XIII

Memperhatikan latar belakang di atas dan fenomena diberbagai daerah dan negara bahwa memaksakan identitas tertentu dalam politik acapkali memunculkan konflik, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme”**.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa itu politik identitas, (2) Untuk mengetahui apa itu pluralisme, dan ke (3) Untuk mengetahui risiko politik identitas terhadap pluralisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dan dalam penyusunannya menggunakan teknik bibliografi, bibliografi menurut KBBI yaitu daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Risiko

Menurut KBBI³ bahwa risiko ialah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Risiko ialah suatu yang dapat terjadi dan ada unsur bahaya atau akibat yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Menurut Soemarno resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidak pastian dengan seluruh konsekuensi yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut Subekti resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan suatu pihak . Sementara menurut Isto adalah bahaya yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Beberapa pengertian di atas memberikan gambaran bahwa risiko ialah akibat yang merugikan dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan datang atau sedang terjadi.

Pengertian Politik

Politik secara umum ialah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dalam wujud proses pembuatan keputusan dalam bernegara (Maxmanroe.com). Adapun definisi yang lain yaitu politik ialah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstusional maupun non konstitusional.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1117

Asal mula kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti negara kota⁴ (Kencana, 2010, hlm. 9). Adapun politik menurut bahasa arab ialah *syiasyah* atau lebih sering kita dengar ialah siasat yang berarti politik itu sebuah kecerdikan dan kebijaksanaan dalam mengamalkan sebuah keputusan dalam berenegara.⁵

Menurut Gabriel A. Almond lebih mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu, di mana kendali ini didukung lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif

Menurut Johan Kaspar Bluntschli dalam buku *The Teory of the State*⁶ : “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya

The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development.

Menurut Roger H. Soltau⁷ berpendapat bahwa ilmu politik untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang mewujudkan tujuan tersebut, hubungan antar masyarakatnya, antar negara, dan juga apa yang ada dipikiran masyarakatnya, keluhan dapat ditulis dalam berbagai pertanyaan. Menurut Inu Kencana⁸ politik adalah seni karena banyak juga politikus tanpa pendidikan ilmu politik, tapi bisa terjun dalam dunia politik dan sukses itu berarti beberapa orang memiliki bakat sejak lahir dari naluri sebagai seniman politik. Politik juga merupakan ilmu karena ia memiliki subjek, objek, metodologi, terminologi, ciri, teori yang khas dan dapat diterima secara universal.

Maka dari beberapa pengertian politik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa politik ialah ilmu atau seni dalam bernegara untuk mewujudkan tujuan dan membuat keputusan untuk kepentingan bersama dalam wilayah tertentu.

⁴ Kencana, S. I. (2010). Ilmu Politik. Dalam S. I. Kencana, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 9

⁵ Kencana, S. I. , h. 9

⁶ SiH. (2008, November 21). *Pengertian Politik*. Retrieved from Ruhcitra: <https://ruhচিত্রা.wordpress.com/2008/11/21/pengertian-politik/>

⁷ Kencana, S. I. , h. 10

⁸ Kencana, S. I. , h. 10

Pengertian Identitas

Identitas menurut KBBI⁹ ialah jati diri maksudnya ialah suatu hal yang ada dalam diri kita, seperti karakter, sifat, watak dan kepribadian. Kata identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris Identity yang berarti ciri atau tanda.¹⁰

Adapun pengertian identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan sejumlah orang dan apa yang membedakan ia dengan orang yang lain, dari pengertian ini menunjukkan betapa pentingnya identitas bagi suatu individu ataupun kelompok.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa identitas ialah sesuatu yang ada pada diri seseorang atau benda yang membedakan ia dari yang lainnya

Pengertian Politik Identitas

Politik identitas adalah politik yang di anut oleh sebahagian warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya yang asal mulanya dari sebuah kelompok sosial yang merasa terdiskriminasi oleh negara dan pemerintah dalam sistem pemerintahan dari mayoritas terhadap minoritas¹¹

Menurut Ahmad Syafi'i Marai¹² dalam politik identitas lebih terkait dengan masalah identitas, agama, ideologi, dan kepentingan elite lokal yang selanjutnya merangkul kesamaan dasar persamaan-persamaan tertentu baik ras, agama, etnis dan juga jenis kelamin. Sementara itu Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas ialah aktivitas politik yang didasarkan pada pengalaman ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu, sehingga menghimpun orang yang senasib untuk menaikkan derajatnya.

Menurut Bagir politik identitas adalah nama dari kebangkitan suatu kelompok sebagai tanggapan represi yang memarginalisasikan masa lalu. identitas berubah menjadi politik ketika mereka berkumpul untuk mengajukan aspirasi kelompok. Demikian halnya menurut Lukmanto politik identitas ialah politik untuk mengedepankan kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik.

Politik identitas menurut LSM "Kapal Perempuan"¹³, politik identitas dibagi menjadi dua jenis:

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 517

¹⁰ Echols, J. & Hasan Shadily (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia, 2005), h. 310

¹¹ Lestari, Y. S., Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1) 2019, h.19-29.

¹² Abdillah, A., Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212 Antara Politik Identitas dan Jihad Politik Alternatif. *An-Rida (Jurnal Pemikiran Islam)*, 41(2) 2017, h. 202-211. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12947>

¹³ Munawar, R. B., *reorientasi pembaruan islam sekularisasi, liberalisasi dan pluralisme paradigma baru islam indonesia*. (Malang: PUSAM UMM, 2018), h. xiii

1. Politik identitas yang bersumber pada kehendak untuk mencapai dan mempertahankan atau memelihara hegemoni kelompok mayoritas,
2. Politik identitas yang dilancarkan oleh kelompok minoritas untuk bertahan dan dapat memelihara identitas kelompoknya.

Politik identitas ini dapat bersifat positif ataupun bersifat negatif. Bersifat positif bagi kelompok yang melakukan politik tersebut karena dapat mengangkat derajat dan martabat suatu golongan tertentu tapi menjadi sesuatu yang negatif bagi beberapa pihak misalnya munculnya deskriminasi terhadap suatu golongan yang menimbulkan kelompok mayoritas dan minoritas hal tersebut bisa diperparah bila dilegitimasi oleh pemerintah. Maka diperlukan lah peran negara untuk mengatur keharmonisan antar golongan dengan memberikan hak yang sama dan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing agar masyarakat dapat hidup harmonis.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengerian di atas bahwa politik identitas adalah politik yang pada dasarnya merangkul pada persamaan identitas untuk menaikkan derajat suatu kelompok dikarenakan rasa ketidakadilan.

Pengertian Pluralisme

Adapun pluralisme menurut KBBI¹⁴ keadaan masyarakat yang majemuk atau dalam artian dalam masyarakat yang berbeda pola maksudnya ialah masyarakat yang beragam. Menurut Mohammed Fathi Osman¹⁵ mendefinisikan pluralisme sebagai bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau seluruhnya, maknanya lebih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Menurut syamsul maarif berpendapat bahwa pluralisme adalah suatu sikap saling memahami, dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama.

Maka dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pluralisme ialah suatu keadaan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam sehingga terciptanya masyarakat yang rukun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan tentang risiko politik identitas terhadap pluralisme yang bersumber dari buku-buku yang dikumpulkan oleh penulis, yaitu:

Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme

Politik identitas mulai menarik para peneliti pada tahun 1970-an, karena pada saat itu di Amerika Serikat mulai munculnya masalah minoritas, gender, feminisme, ras dan lain-lain. Dalam

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1086

¹⁵ Munawar, R. B., *Reorientasi Pembaruan Islam Sekulerisasi, Liberalisasi Dan Pluralisme Pradigma Baru Islam Indonesia*. (Malang: PUSAM UMM, 2018), h. 541

perkembangannya politik identitas mengalami perluasan cakupan yaitu, agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Politik identitas pada awalnya memiliki tujuan untuk menaikkan derajat suatu kelompok atau identitas tertentu yang bisa terjadi dikarenakan ketidakadilan atau ketidakpuasan, tetapi politik identitas kini dijadikan alat berpolitik untuk memperoleh suara di pemilu, menaikkan pamor politik seseorang, dan mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia sendiri dalam riset fox dan mechnik sebanyak 65% poster kampanye pilkada mengandung muatan yang menekankan pada dimensi identitas para kandidat dalam pilkada, tingginya politik identitas juga dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang dikelilingi oleh kelompok. Adapun beberapa contoh politik identitas sebagai berikut:

- 1) Kemenangan Trump Di Amerika Serikat, politik identitas yang ia lakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakannya yang membatasi imigran dari negara-negara Muslim, yang menyebabkan munculnya aksi demonstrasi dari warga Muslim di sana.
- 2) Kemenangan Jair Bolsonaro, dia sama seperti Trump yang rasis sehingga ia mendapat julukan "Trump Tropis", politik identitas yang ia lakukan rasis terhadap kaum Gay, wanita, dan terhadap ras kulit hitam.
- 3) Pilkada DKI, terjadi sentimen politik identitas yang sangat kuat, di mana pribumi mengkhuskan diri dan menolak non-pribumi.
- 4) Pilpres 2019, dapat dilihat dari munculnya istilah "cebong" dan "kampret" yang berlanjut hingga saat ini.
- 5) Munculnya kerusuhan di Wamena dan Jayapura, pembantaian terhadap para pendatang dari Jawa dan Sumatera.

Dilihat dari konsep politik identitas yang menonjolkan perbedaan antar kelompok atau individu tentu hal ini jika diterapkan pada masyarakat yang primordialis di dalam masyarakat yang plural dengan cara yang tidak tepat tentu dapat beresiko hilangnya nilai pluralisme suatu bangsa, terlebih banyak isu-isu yang hanya berupa opini yang memungkinkan memperkeruh suasana, meski belum ada contoh kasus yang nyata dari hilangnya pluralisme secara mutlak tapi sudah ada beberapa negara yang pluralismenya luntur yang disebabkan oleh politik identitas terhadap suatu bangsa tetapi, jika dibiarkan tentu dapat beresiko, lunturnya pluralisme suatu bangsa akan memunculkan beberapa risiko masalah yang lain seperti:

- 1) Hilangnya toleransi antar kelompok, contohnya di Amerika Serikat tingginya rasis terhadap para imigran Muslim, dan selalu mengidentikan kejahatan yang ada dengan aksi terorisme para imigran.
- 2) Dapat menyebabkan kekerasan fisik atau non-fisik seperti penindasan terhadap suatu kelompok seperti, penindasan ras kulit putih terhadap ras kulit hitam di Amerika Serikat, penghinaan terhadap warga Papua itu monyet dan lain-lain.

- 3) Karena hilangnya toleransi dapat menimbulkan gerakan disintegrasi bangsa, contohnya gerakan Papua Merdeka, gerakan PKI Madiun, dan lain-lain,
- 4) Karena gerakan disintegrasi dapat berdampak pada pecah/hancurnya suatu negara dikarenakan banyak pemberontakan dalam negeri.

Dari risiko hilangnya pluralisme karena politik identitas dapat menyebabkan risiko lainnya karena pluralisme merupakan dasar untuk hidup berdampingan adalah, meski beberapa orang salah paham akan makna dari pluralisme tetapi pluralisme tetap diperlukan untuk sebuah bangsa agar masyarakat dapat hidup dengan berdampingan tanpa adanya perselisihan dikarenakan perbedaan, yaitu dengan cara pengakuan pembebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan mendapat informasi, dalam hal ini kematangan cara berpikir masyarakat pun berpengaruh, peran pemerintah pun diperlukan untuk meredam gejala yang ditimbulkan oleh politik identitas dengan cara menanamkan nilai nasionalis pada jiwa rakyatnya, bila sudah terjadi dapat mengadakan diskusi untuk mencari jalan keluar.

Politik identitas memang tidak mutlak salah karena ada beberapa yang menggunakan politik identitas ini untuk memperjuangkan kelompok dirinya untuk mendapatkan ketidakadilan dan tentu ini bukan hal yang salah, tapi tidak sedikit juga yang menggunakannya hanya untuk ambisi para politisi itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah di paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Politik identitas adalah politik yang pada dasarnya merangkul persamaan identitas untuk menaikkan derajat suatu kelompok dikarenakan rasa ketidakadilan, politik ini mengalami perkembangan yang tadinya untuk menaikkan derajat kelompok tertentu menjadi alat berpolitik yang ditunggangi oleh para elit politik untuk kepentingan pribadi dan untuk meraih suara saat pemilu. Sementara itu Pluralisme ialah suatu keadaan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam sehingga masyarakat dapat hidup secara rukun. Pluralisme dalam suatu bangsa itu cukup penting apalagi di daerah yang multi suku, agama, ras, dan antar golongan agar dapat hidup dengan saling berdampingan. Sedangkan Risiko yang dapat timbul dari politik identitas terhadap pluralisme ialah hilangnya atau lunturnya pluralisme itu sendiri, hilangnya pluralisme tentu dapat menimbulkan risiko yang lainnya seperti hilangnya toleransi antar masyarakat, dapat menyebabkan kekerasan baik secara fisik atau non-fisik, munculnya gerakan disintegrasi dalam negeri, dan risiko terparahnya ialah hancurnya suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2017, Desember -). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212 Antara Politik Identitas dan Jihad Politik Alternatif. *An-Rida (Jurnal Pemikiran Islam)*, 41(2), 202-211. doi:<http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12947>
- Dosen sosiologi.com. (2018, Februari 6). *3 Pengertian Politik Identitas dan Contohnya Menurut Ahli Lengkap*. Retrieved from Dossensosiologi.com: <http://dossensosiologi.com/pengertian-politik-identitas-dan-contohnya-menurut-ahli-lengkap/>
- Dosen sosiologi.com. (2019, April 2019). *Pengertian Pluralisme, Macam, dan Contohnya*. Retrieved from Dossensosiologi.com: <http://dossensosiologi.com/pengertian-pluralisme/>
- DW.Com. (2018, Oktober 29). *"Trump Tropis" Jair Bolsonaro Menangkan Pemilu Presiden di Brasil*. Diambil kembali dari DW.com: <https://www.dw.com/id/trump-tropis-jair-bolsonaro-menangkan-pemilu-presiden-di-brasil/a-46076737>
- Echols, J. &. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Habibi, M. (2017). analisis politik identitas di Indonesia.
- Kencana, S. I. (2010). Ilmu Politik. Dalam S. I. Kencana, *Ilmu Politik* (hal. 9). jakarta: rineka cipta.
- Lestari, Y. S. (2018, Desember). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politic and Policy*, 1(1), 19-29. Retrieved Januari Minggu, 2022
- Muhammad, H. (2017). analisis politik indonesia di Indonesia. *researchgate*, 2.
- Munawar, R. B. (2018). *reorientasi pembaruan islam sekulerisasi, liberalisasi dan pluralisme paradigma baru islam indonesia*. malang: PUSAM UMM.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). *KBBI Edisi 4*. Jakarta: PT Gramedia.
- Utsmani, K. R. (2018). *Mushaf Tilawah dan Hifzhil Qur'an*. Garut: Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut.
- Perkasa, R. (2018, november 20). *Politik Identitas, Masihkah Relevan?* Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/ricardo-perkasa/politik-identitas-masihkah-relevan-1542708823401442391>
- Purwanti, p. (2019, april 9). *5 bahaya politik identitas*. Retrieved from hukamnas: <https://hukamnas.com/bahaya-politik-identitas>
- Ratma Ningsih, d. (2013, November). www.academis.edu. Retrieved from <https://www.acadeis.edu/6194297>
- SiH. (2008, November 21). *Pengertian Politik*. Retrieved from Ruhcitra: <https://ruhচিত্রা.wordpress.com/2008/11/21/pengertian-politik/>